

Effectiveness Of The Non-Cash Food Assistance Program (PBNT) In Improving The Welfare Of The Poor [Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin]

Gita Nanda Sulistiya¹⁾, Isna Fitria Agustina^{*.2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnaagustina@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to describe the effectiveness of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in improving the welfare of poor communities in Larangan Village, Candi District, Sidoarjo Regency. This research is important to conduct considering the ongoing administrative problems and varying levels of BPNT success at the village level. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection was conducted through in-depth interviews, field observations, and documentation of the BPNT program implementation. The analysis of program effectiveness uses effectiveness indicators according to Duncan in Steers, namely goal achievement, integration, and adaptation. The results show that the implementation of the BPNT Program in Larangan Village is quite effective. In terms of goal achievement, the program has been on target because assistance is provided to poor communities who truly need it, especially vulnerable groups such as the elderly without a fixed income. In terms of integration, coordination and socialization between the village government, hamlet heads, RW (Community Unit), and RT (Neighborhood Unit) went well so that program information was received evenly by the community. Meanwhile, in terms of adaptation, beneficiary communities were able to adjust to the electronic card-based non-cash distribution system, although administrative obstacles such as inconsistencies in recipient data and problems with aid disbursement were still encountered. The novelty of this research lies in the use of Duncan's effectiveness indicators in the context of village governance, as well as empirical findings regarding administrative barriers that directly impact program effectiveness at the local level. This research provides practical implications for village governments and policymakers to strengthen data validation, improve cross-actor coordination, and simplify administrative procedures to enhance the effectiveness and sustainability of the BPNT Program.*

Keywords - effectiveness of BPNT, community welfare, social policy

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini penting dilakukan mengingat masih ditemukannya permasalahan administratif dan variasi tingkat keberhasilan BPNT di tingkat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap pelaksanaan program BPNT. Analisis efektivitas program menggunakan indikator efektivitas menurut Duncan dalam Steers, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program BPNT di Desa Larangan tergolong cukup efektif. Pada aspek pencapaian tujuan, program telah tepat sasaran karena bantuan diberikan kepada masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan, khususnya kelompok rentan seperti lansia tanpa penghasilan tetap. Pada aspek integrasi, koordinasi dan sosialisasi antara pemerintah desa, kepala dusun, RW, dan RT berjalan dengan baik sehingga informasi program dapat diterima masyarakat secara merata. Sementara itu, pada aspek adaptasi, masyarakat penerima manfaat mampu menyesuaikan diri dengan sistem penyaluran non tunai berbasis kartu elektronik, meskipun masih ditemukan kendala administratif seperti ketidaksesuaian data penerima dan permasalahan pencairan bantuan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan indikator efektivitas Duncan dalam konteks pemerintahan desa serta temuan empiris terkait hambatan administratif yang secara langsung mempengaruhi efektivitas program di tingkat lokal. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah desa dan pembuat kebijakan untuk memperkuat validasi data, meningkatkan koordinasi lintas aktor, serta menyederhanakan prosedur administrasi guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan Program BPNT.*

Kata Kunci - efektivitas BPNT, kesejahteraan masyarakat, kebijakan sosial

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang masih dihadapi oleh beberapa negaranegara di dunia, khususnya di Indonesia. Salah satu masalah utama yang menyebabkan kemiskinan adalah kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, terutama bagi orang-orang dengan pendidikan yang tidak cukup, yang kesulitan memperoleh pekerjaan yang memadai. Selain itu, kemiskinan adalah sebuah masalah yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, seperti tingkat penghasilan, akses terhadap pendidikan, ketersediaan barang dan layanan, lokasi geografis, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, serta kondisi lingkungan. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan berperan dalam munculnya kemiskinan di masyarakat [1].

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Melalui bantuan yang diberikan secara non tunai, masyarakat penerima manfaat dapat mengakses bahan pangan secara lebih mudah, terjangkau, dan berkelanjutan. Hal ini berdampak pada berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga, sehingga pendapatan yang dimiliki dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, program ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, sehingga mendorong terciptanya kondisi hidup yang lebih layak. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah kemudian mengimplementasikan program BPNT sebagai salah satu kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Program-program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan[2]. Salah satu program yang dibuat pemerintah untuk mengurangi kewajiban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) [3] Dasar pelaksanaan BPNT adalah Perpres RI Nomor 63 tahun 2017, tentang penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai. Pada awalnya, program BPNT merupakan program pengganti dari program Beras Sejahtera (RASTRA). BPNT adalah bantuan pangan yang diberikan secara non tunai oleh pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya. Bantuan ini disalurkan melalui akun elektronik yang hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan di toko-toko yang telah bekerja sama dengan Bank negara. yang kemudian dapat di gunakan untuk memperoleh beras dan telur di e-warung, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang seimbang. [4]

Pelaksanaan Program BPNT di Desa Larangan telah dilakukan, Bantuan diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) Program BPNT yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. [5] Mekanisme penyalurannya melalui bank penyalur mencakup proses registrasi dan pembukaan rekening bagi KPM, penyampaian informasi serta sosialisasi mengenai program tersebut, penyaluran bantuan, hingga penarikan uang atau pembelian bahan pokok dalam Program Sembako. Penyaluran bantuan kepada KPM dilakukan secara bertahap, sehingga tidak semua penerima langsung mengajukan permohonan pada saat yang sama. KPM yang mendapat giliran untuk menerima Program BPNT akan diberi informasi oleh aparatur desa ketika bantuan yang seharusnya diterima sudah tersedia. Namun demikian, kondisi eksisting di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPNT belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi proses penyaluran bantuan, seperti ketidaksesuaian data penerima dengan sistem perbankan yang menyebabkan bantuan tidak dapat dicairkan, serta adanya penerima yang telah meninggal dunia namun datanya belum dapat diperbarui secara cepat sehingga bantuan tidak tersalurkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan administratif yang

mempengaruhi efektivitas program. Berikut merupakan data penerima program bantuan BPNT yang seharusnya terealisasi:

Tabel 1. Data Realisasi Penerima Program BPNT di Desa Larangan

Tahun	Jumlah penerima	Jumlah yang tersalurkan
2021	94	90
2022	90	90
2023	103	101
2024	103	101
2025	103	101

Sumber : *Pemerintah Desa Larangan (2025)*

Berdasarkan data pada tabel 1 tersebut, bahwa realisasi penerima program BPNT di Desa Larangan menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerimaan. terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi realisasi bantuan. Pada tahun 2021, jumlah penerima 94 dan jumlah yang tersalurkan 90 penerima terdapat 4 orang yang tidak menerima bantuan. Dari jumlah tersebut, 4 orang tersebut gagal karena nama di rekening bank tidak sama dengan data yang tercatat. Hal ini terjadi karena adanya kegagalan dalam proses pencairan dana yang menyebabkan sistem perbankan tidak dapat memvalidasi identitas penerima, sehingga proses pencairan bantuan tidak bisa dilakukan. Pada tahun 2022 proses distribusi berjalan lebih baik, di mana seluruh penerima yang terdaftar berhasil menerima bantuan tanpa kendala dan dilakukan pengambilan bantuannya secara bertahap. Pada tahun 2023 terdapat 2 penerima bantuan yang tidak terealisasi karena penerima telah meninggal dunia dan ahli waris berusaha mencairkan bantuan, akan tetapi proses tersebut tidak berhasil karena data penerima tidak dapat dialihkan secara langsung yang mencairkan bantuan tersebut. Hal ini menimbulkan hambatan dalam penyaluran, sebab bantuan menjadi hangus dan tidak sampai pada keluarga penerima manfaat. Pada tahun 2024 dan 2025 proses distribusi bantuan berjalan lancar, di mana seluruh penerima yang terdaftar berhasil menerima haknya tanpa kendala.

Dari data ini, terlihat bahwa kendala administratif dalam proses pencairan dana. Efektivitas pada penyaluran program BPNT di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo yakni, yang pertama terdapat permasalahan Pada tahap pencairan dana Program BPNT, terdapat penerima bantuan yang identitasnya tidak ditemukan pada sistem bank penyalur. Hal ini mengakibatkan penerima tidak dapat mencairkan haknya sesuai jadwal, sehingga menimbulkan hambatan dalam keberhasilan program. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan penyaluran bantuan melalui pos penyalur yang seharusnya berjalan lancar, tepat sasaran, dan tepat waktu. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam pemantauan pelaksanaan program yang mensyaratkan administrasi harus tepat. Dan kedua terdapat permasalahan bantuan yang tidak tersalurkan karena penerima telah meninggal dunia dan tidak bisa diganti oleh ahli waris. Meskipun ahli waris berusaha mencairkan bantuan tersebut, proses pencairan tetap tidak dapat dilakukan. Hal ini disebabkan oleh aturan administrasi yang tidak memungkinkan data penerima dialihkan secara langsung kepada ahli waris. Akibatnya, bantuan yang seharusnya menjadi hak keluarga penerima manfaat tidak tersalurkan dan dinyatakan hangus.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh [6] Nafilah Dzakiyah Al Azizah, Isna Fitria Agustina (2025) tentang bantuan sosial dalam upaya pengurangan kemiskinan Desa Banjarbendo. Penelitian ini menyimpulkan berjalan cukup baik dan mampu membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, sehingga berkontribusi pada

pengurangan angka kemiskinan di Desa tersebut. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Dengan pendekatan kualitatif. Penelitian saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena fokus pada Efektivitas Program BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Larangan.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Mety Ernawat(2022) [4] Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan belum sepenuhnya efektif. Program ini memang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok, namun masih terdapat beberapa kendala yang mengurangi efektivitasnya, seperti data penerima yang belum akurat, masih adanya penyalahgunaan bantuan, hambatan teknis dalam pencairan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan program. Penelitian ini menggunakan teori Menurut Campbell J.P. menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena menggunakan teori yang berbeda.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Adam Wira Sanjay (2022)[7] Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan dinilai belum efektif. Program ini memang memberikan kemudahan akses pangan bagi keluarga penerima manfaat, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, lambatnya proses penyelesaian masalah, serta alur birokrasi yang belum optimal. Akibatnya, tujuan utama program untuk benar-benar mengentaskan kemiskinan belum tercapai secara maksimal. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi. Penelitian yang dilakukan saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah pada pemilihan lokasi penelitian

[8] Menurut oleh Duncan dalam Steers (2003) terdapat tiga aspek untuk mengukur Efektivitas suatu program. Tiga aspek tersebut adalah yang pertama pencapaian tujuan, yakni segala usaha dalam perolehan tujuan harus diketahui menjadi sebuah proses. Kedua integrasi, yakni tingkatan kemampuan sebuah organisasi yang diukur dalam melakukan sosialisasi dengan pihak lain dan melaksanakan aktifitas program kerja yang sudah disetujui. Selanjutnya Adaptasi, yakni kemampuan yang dimiliki suatu organisasi dalam menyelaraskan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi mencakup sarana prasarana dan peningkatan kemampuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah Metode penelitian kualitatif adalah cara penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena dalam kondisi alami [9]. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Lokasi ini dipilih karena ada permasalahan terkait efektivitas program BPNT. Fokus penelitian ini terdapat pada Efektivitas program BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo . Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan bapak Moden yang memiliki pemahaman tentang program ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah percakapan langsung yang dilakukan untuk memperkuat data sekunder dalam penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati berbagai fenomena di lapangan, baik yang secara langsung terkait maupun tidak langsung terkait dengan penelitian. Sementara itu, teknik dokumentasi adalah salah satu cara mengumpulkan data dalam penelitian sosial yang digunakan untuk menemukan informasi historis. Teknik pemilihan

informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu memilih sampel berdasarkan penilaian terhadap karakteristik yang dibutuhkan dan sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Informan pada penelitian ini adalah pak moden (bapak anwari), Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti model analisis data dari Miles dan Huberman, yang melibatkan proses mengorganisir, menganalisis dan menginterpretasikan data nonnumerik untuk menghasilkan informasi atau pola yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian. Proses analisis data terdiri dari empat langkah, yaitu 1.) Pengumpulan data adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui atau mengumpulkan berbagai fenomena, informasi, atau kondisi yang berkaitan dengan tempat dan jangkauan penelitian. 2.) Reduksi data adalah proses memilih, fokus, menyederhanakan, dan mengubah data yang didapatkan dari lapangan. 3.) penyajian data, yang mencakup pengaturan data yang sudah terorganisir agar lebih mudah digunakan untuk mengambil kesimpulan. 4.) Penarikan kesimpulan, yaitu tahap dimana peneliti menyimpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam pendahuluan [10]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, peneliti berhasil memperoleh hasil pembahasan dalam penelitian ini yang berjudul Efektivitas program BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah semua upaya untuk mencapai tujuan, yang harus dianggap sebagai sebuah proses. Sedangkan tujuan adalah hasil akhir atau sasaran yang ingin dicapai. Tujuan juga menjadi arah yang dituju dalam melakukan suatu tindakan agar program tersebut lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya[11]. Efektivitas memiliki keterkaitan dengan indikator evaluasi kebijakan, yaitu sejauh mana hasil yang diperoleh telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan dipandang sebagai suatu proses yang mencerminkan keseluruhan upaya dalam mewujudkan sasaran program. Adapun tujuan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, meningkatkan kualitas asupan gizi yang seimbang, serta memberikan kendali dan alternatif pilihan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok secara tepat sasaran. Pencapaian tujuan yang terjamin memerlukan suatu proses pentahapan yang baik, dalam arti memerlukan tahapan-tahapan untuk mencapai bagian-bagiannya. Pencapaian tujuan memiliki beberapa faktor yakni kurun waktu yang ditentukan, pencapaian sasaran sebagai target kongkrit, dan dasar hukum[12]. Faktor –faktor tersebut akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui efektivitas program BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Anwari selaku Kasi Kesejahteraan Pemerintah Desa Larangan sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaannya, pencairan bantuan tidak dilakukan secara serentak kepada seluruh penerima, melainkan berlangsung secara bertahap. Setiap kali terdapat pemberitahuan pada sistem terkait nama penerima yang dana bantuannya telah tersedia, pihak terkait akan segera menginformasikan kepada yang bersangkutan agar melakukan pengecekan dan segera melakukan penarikan bantuan tersebut.” (wawancara 10 september 2025)

Dari segi tujuan program, Program Sembako bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pelaksanaan di Desa Larangan ini mempermudah penerima bantuan dalam mengakses dana secara mandiri melalui kartu keluarga sejahtera (KKS), Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti penumpukan antrean di warung tertentu yang menjadi lokasi penyaluran, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi penerima bantuan. Menanggapi hal tersebut, pemerintahan Desa Larangan memberikan kebebasan bagi penerima bantuan untuk mengambil dana melalui ATM yang tertera dalam keterangan pada KKS, sehingga penerima dapat membelanjakan sembako dimana saja. Di samping itu, pemerintah desa juga terus melakukan pengawasan dan penangan yang terjadi di lapangan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bu Ika sebagai Sekretaris Desa di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo yaitu :

“ Dalam pelaksanaan program BPNT, langkah awal yang kami lakukan adalah menyeleksi masyarakat yang memenuhi kriteria untuk didata sebagai calon penerima bantuan. Prioritas diberikan kepada lansia berusia 60 tahun ke atas, yang sudah tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki suami. Proses penginputan data penerima BPNT dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi tersebut agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.” (wawancara 10 september 2025)

Berdasarkan pernyataan diatas jika dikaitkan dengan indikator pencapaian tujuan yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers dengan melihat pelayanan yang dilakukan untuk program BPNT disesuaikan dengan prioritas masyarakat yang tidak mampu sehingga tentunya didalam pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan program BPNT ini dapat sesuai dengan porsi dan kebutuhannya. Tahap awal yang dilakukan adalah melakukan seleksi terhadap masyarakat yang akan didata sebagai calon penerima bantuan. Kriteria penerima bantuan diprioritaskan kepada lansia berusia 60 tahun ke atas, yang sudah tidak memiliki pekerjaan serta tidak memiliki suami. Proses penginputan data penerima dilakukan dengan cermat agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan program. Berikut merupakan data laporan masyarakat miskin yang meninggal Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

Tabel 2. Data Penerima BPNT Yang Meninggal

Tahun	Jumlah yang meninggal
2022	4
2023	2

Sumber : Pemerintahan Desa Larangan (2025)

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 terdapat 4 rang warga penerima program BPNT yang telah meninggal dunia. Setelah dilakukan pelaporan, seluruh data penerima tersebut telah dihapus dari daftar, sehingga data pada tahun 2022 dinyatakan valid. Sementara itu, pada tahun 2023 tercatat 2 orang warga penerima BPNT yang meninggal dunia, dan setelah dilakukan verifikasi serta pelaporan, data keduanya juga telah dihapus dari sistem. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data penerima program BPNT di Desa Larangan telah valid dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Berdasarkan teori efektivitas menurut Duncan dalam Steers yang terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, hasil penelitian di Desa Larangan menunjukkan kesesuaian antara indikator teoritis dengan kondisi empiris di lapangan, meskipun masih terdapat beberapa perbedaan. Indikator pencapaian tujuan, teori menyatakan bahwa efektivitas diukur dari sejauh mana program mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Pada indikator pencapaian tujuan pelaksanaan Program BPNT di Desa Larangan menunjukkan bahwa secara program telah sesuai dengan sasaran, yaitu masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan, khususnya kelompok rentan seperti lansia tanpa penghasilan tetap. Hal ini menandakan adanya kesesuaian antara tujuan program dengan realisasi di lapangan. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi ideal (teori), masih terdapat ketidaksempurnaan, terutama karena kendala administratif seperti ketidaksesuaian data penerima dan keterlambatan pencairan bantuan. Artinya, pencapaian tujuan sudah baik tetapi belum optimal.

2. Integrasi

Integrasi adalah proses mengevaluasi sebuah organisasi dalam membangun hubungan sosial, mencapai kesepakatan bersama, berbagi informasi, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan yang beragam. Indikator integrasi mencakup kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di lapangan. Sosialisasi merupakan suatu proses penanaman kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat [13]. Begitu pula dengan program BPNT yang ada pada lingkungan Pemerintah Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Sosialisasi memegang peranan penting untuk keberhasilan dari sistem informasi tersebut. Rapat dapat menjadi salah satu cara untuk melaksanakan sosialisasi atau menyalurkan informasi kepada banyak orang. Meskipun terdapat banyak program atau kebijakan yang diluncurkan, tidak semua pelaksana berhasil menyampaikan informasi secara efektif pada masyarakat. Melalui indikator integrasi, dapat dinilai sejauh mana suatu organisasi mampu menjalin hubungan dan kerja sama dengan organisasi lain. Dalam penelitian tentang efektivitas program BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Larangan Kecamatan Candi dapat dikatakan efektif apabila indikator integrasi dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang ada. Prosedur adalah rangkaian kegiatan atau tindakan yang melibatkan beberapa orang dalam satu organisasi atau lebih, yang dilakukan berulang kali dengan cara yang sama. Prosedur adalah rangkaian kegiatan atau tindakan yang melibatkan beberapa orang dalam satu organisasi atau lebih, yang dilakukan berulang kali dengan cara yang sama [14]. Indikator integrasi terdiri dari beberapa komponen, yakni: (1) prosedur (2) proses sosialisasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak anwari selaku Kasi Kesejahteraan Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan sosialisasi program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT), Pemerintah Desa Larangan berupaya agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami informasi terkait bantuan tersebut. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan perangkat desa mulai dari kepala dusun, RW, hingga RT. Masing-masing dari mereka bertugas untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada warga di wilayahnya. Melalui cara ini, masyarakat menjadi lebih paham mengenai syarat dan mekanisme sebagai calon penerima program BPNT, karena penyampaian informasi dilakukan secara merata hingga ke tingkat bawah”

Berdasarkan pernyataan yang dikatakan oleh Bapak Anwari Pemerintah Desa Larangan bahwa pelaksanaan sosialisasi program BPNT di Desa Larangan telah dilakukan secara terstruktur dan melibatkan berbagai unsur

pemerintahan di tingkat desa. Pemerintah Desa tidak hanya menyampaikan informasi secara langsung, tetapi juga memberdayakan perangkat desa seperti kepala dusun, RW, dan RT untuk meneruskan informasi kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Dengan strategi ini, penyebaran informasi menjadi lebih efektif dan merata, sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik syarat, mekanisme, dan tujuan dari program BPNT, serta memastikan bahwa calon penerima bantuan benar-benar mengetahui prosedur yang berlaku. Dari segi pelaksana kegiatan program, Pemerintah Desa larangan berperan dalam memastikan bahwa pencairan bantuan berjalan dengan lancar serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme pencairan yang diterapkan. Salahsatu keluhan yang sering muncul dari masyarakat adalah perbedaan waktu pencairan bantuan antar penerima. Banyak warga yang mempertanyakan mengapa bantuan tidak cair secara bersamaan, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penerima. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Agus Siswanto selaku Kepala Desa di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

“ Biasanya, keluhan yang sering muncul dari masyarakat berkaitan dengan proses pencairan bantuan yang tidak dilakukan secara bersamaan. Banyak penerima yang mempertanyakan mengapa bantuan tidak langsung diterima oleh semua pihak dalam waktu yang sama. Menanggapi hal tersebut, saya memberikan penjelasan dan pemahaman bahwa proses pencairan bantuan memang dilakukan secara bertahap, sehingga setiap penerima akan mendapatkan bantuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan tidak bisa dicairkan secara serentak.”

Berdasarkan pernyataan yang dikatakan oleh Bapak Agus Untuk mengatasi keluhan tersebut, pemerintah desa memberikan penjelasan bahwa pencairan bantuan dilakukan secara bertahap, Oleh karena itu, tidak seluruh penerima dapat menerima bantuan dalam waktu yang bersamaan, melainkan harus menunggu giliran masing-masing sesuai dengan informasi yang tercantum dalam sistem. sehingga tidak semua penerima dapat menerima dana pada waktu yang sama. Setelah dijelaskan, masyarakat akhirnya mengerti. Berikut merupakan foto kegiatan sosialisasi program BPNT Desa Larangan, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:



Gambar 1. kegiatan sosialisasi program BPNT 2025
Sumber : Pemerintah Desa Larangan

Dari hal tersebut, pada indikator integrasi dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pelaksanaan program BPNT di Desa Larangan Melalui integrasi tersebut, proses penyebaran informasi menjadi lebih efektif karena setiap tingkatan perangkat Desa memiliki tugas yang jelas dalam menyampaikan informasi sampai kepada masyarakat yang paling bawah. Hal ini membuat masyarakat lebih mudah memahami persyaratan, cara kerja, serta tujuan dari program BPNT, sehingga terjalin keselarasan antara pemerintah desa sebagai pelaksana dan

masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan demikian, indikator integrasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyosialisasian program BPNT tidak terlepas dari kebersamaan, komunikasi yang baik, serta kerja sama yang solid antar komponen pemerintahan desa dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut.

Dalam teori Duncan, integrasi menekankan pada kemampuan organisasi dalam melakukan koordinasi, komunikasi, dan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait agar program dapat berjalan dengan baik. Pada indikator integrasi, pelaksanaan program BPNT dapat dikatakan paling optimal dibanding indikator lainnya. Hal ini terlihat dari adanya koordinasi yang baik antara pemerintah desa, kepala dusun, RW, dan RT, serta pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara berjenjang. Jika dibandingkan dengan teori, kondisi di lapangan sudah sangat sesuai, karena komunikasi, kerja sama, dan penyebaran informasi berjalan efektif dan merata. Dengan demikian, indikator integrasi menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi.

3. Adaptasi

Adaptasi yaitu kemampuan untuk merubah dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi disekitar. Adaptasi juga melibatkan interaksi diri sendiri, lingkungan dan orang lain[15]. Adaptasi merupakan suatu kemampuan untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang mengalami perubahan. Indikator adaptasi merupakan indikator yang harus dimiliki dalam penerapan Egovernment melalui Program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT). Indikator adaptasi meliputi pengembangan kemampuan sumber daya manusia termasuk penyesuaian terhadap perkembangan sarana prasarana yang ada. Indikator adaptasi mengacu pada seberapa Efektif Program BPNT dapat menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lapangan. Misalnya, sebelum menggunakan ATM bantuan langsung di drop ke balai desa setiap bulan Berikut merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Anwari selaku Kasi Kesejahteraan Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo mengenai proses adaptasi lingkungan Desa Larangan dengan Program BPNT sebagai berikut :

“ Sebelum menggunakan ATM beras di drop di balai desa dan masyarakat harus mengambil bantuan balai desa setiap bulan. Program BPNT diharapkan mampu memberikan harapan dan perubahan positif bagi masyarakat yang masih kurang mampu. Program ini menunjukkan perhatian pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Bantuan yang diberikan membantu masyarakat yang sebelumnya kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka kini dapat merasakan manfaat nyata dari program tersebut dan taraf hidup serta kesejahteraan mereka berangsur meningkat.”

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa pelaksana program BPNT di Desa Larangan telah mengalami beberapa perubahan dalam sistem penyalurannya. Penyaluran program BPNT saat ini dilakukan menggunakan kartu ATM. Melalui kartu tersebut, penerima manfaat dapat mengambil bantuan di ATM Masing-masing dari penerima KPM. masyarakat menyambut positif adanya program BPNT karena dianggap sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok setiap hari. Kebanyakan penerima manfaat mengatakan bahwa sebelum ada bantuan ini, mereka kesulitan membeli bahan makanan seperti beras, telur, dan minyak goreng. Namun, setelah menerima bantuan dari program BPNT, beban pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari di rumah tangga menjadi lebih ringan. Selain itu, masyarakat juga merasa bahwa program ini merupakan bentuk perhatian nyata pemerintah terhadap kesejahteraan warga yang kurang mampu. Melalui bantuan ini, mereka tidak hanya mendapatkan bantuan ekonomi, tetapi juga merasa lebih diperhatikan dan dihargai. Secara

keseluruhan, wawancara menunjukkan bahwa program BPNT memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski masih ada beberapa masalah seperti Kendala administratif dalam proses pencairan dana atau data penerima yang belum sepenuhnya tepat, manfaat dari program ini tetap dirasakan oleh masyarakat yang menerima bantuan. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Ika selaku Sekretaris Desa di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo yaitu:

“ kadang ada di mana penerima bantuan tidak lagi menerima bantuan pada tahun berjalan akibat adanya perubahan status yang tidak dapat langsung diperbarui dalam sistem, ketika penerima bantuan meninggal dunia, proses penyesuaian data harus melalui tahapan verifikasi terlebih dahulu. Setelah proses tersebut selesai, barulah dapat dilakukan pengajuan penerima baru sebagai pengganti. Apabila dalam satu rumah tangga masih terdapat anggota lain yang dinilai layak menerima bantuan, maka ahli waris atau anggota keluarga tersebut dapat diusulkan sebagai penerima bantuan melalui mekanisme yang berlaku.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan program bantuan terdapat kemungkinan penerima mengalami penghentian pada tahun berjalan akibat perubahan status yang tidak dapat langsung diperbarui dalam sistem. Contohnya, ketika penerima bantuan meninggal dunia, data tidak serta-merta dapat diganti, melainkan harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Setelah verifikasi selesai, barulah dimungkinkan untuk mengajukan penambahan penerima baru. Dalam hal ini, apabila masih terdapat anggota dalam satu rumah tangga yang membutuhkan bantuan, maka ahli waris atau anggota keluarga tersebut dapat diusulkan sebagai penerima pengganti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berikut merupakan foto kegiatan penyaluran program bantuan non tunai (BPNT) di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 2 kegiatan penyaluran bantuan 2025

Sumber : Pemerintah Desa Larangan

Pada indikator adaptasi dapat ditarik pemahaman bahwa Masyarakat yang menerima bantuan mampu berkembang dan menyesuaikan diri dengan adanya program BPNT. Mereka bisa menggunakan bantuan tersebut dengan tepat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti beras, telur, dan minyak goreng. Perubahan ini terlihat dari cara pengeluaran rumah tangga yang lebih teratur dan efisien setelah menerima bantuan. Selain itu, masyarakat juga mulai mengerti cara penyaluran bantuan serta penggunaan kartu BPNT dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa penerima bantuan tidak hanya menerima saja, tetapi juga berusaha menyesuaikan diri dengan aturan dan sistem yang berlaku agar bantuan tersebut bisa memberikan manfaat maksimal bagi hidup mereka. Namun, dalam proses penyesuaian ini masih ada masalah administratif, terutama terkait dengan pencairan dana dan keakuratan data penerima. Beberapa orang yang menerima

bantuan mengalami kesulitan karena ada perbedaan antara data yang tercatat di sistem dengan keadaan sebenarnya di lapangan, seperti penerima yang sudah meninggal atau pindah tempat tinggal. Selain itu, adanya penundaan dalam proses administrasi juga seringkali menghambat pemenuhan bantuan secara tepat waktu. Meskipun begitu, masyarakat tetap berusaha mengerti dan menyesuaikan diri dengan mekanisme program agar bantuan yang diterima bisa digunakan dengan baik.

Menurut teori Duncan, adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, termasuk perkembangan sistem, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini, Program BPNT di Desa Larangan menunjukkan kesesuaian dengan teori karena telah terjadi perubahan sistem penyaluran dari manual menjadi non tunai berbasis kartu elektronik, dan masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan sistem tersebut. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi ideal dalam teori, masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pembaruan data, hambatan pencairan bantuan, serta proses administrasi yang belum fleksibel. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi sudah ada, tetapi belum sepenuhnya berjalan maksimal. Dengan demikian, indikator adaptasi sesuai dengan teori namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan teori Duncan dalam Steers, pelaksanaan Program BPNT di Desa Larangan sudah cukup sesuai dengan indikator efektivitas, terutama pada aspek integrasi. Namun, pada aspek pencapaian tujuan dan adaptasi masih terdapat beberapa kendala administratif yang menyebabkan efektivitas program belum berjalan secara optimal.

VII. SIMPULAN

Berdasarkan indikator pada pengukuran efektivitas program bantuan non tunai (BPNT) di Desa Larangan Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Dilihat dari pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut. Indikator pencapaian tujuan menurut Duncan dalam Steers pada pelaksanaan program BPNT di Desa Larangan menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan sudah mengarah pada pencapaian tujuan program secara efektif. Hal ini terlihat dari adanya proses seleksi penerima bantuan yang jelas pada kriteria kebutuhan riil masyarakat, yaitu memprioritaskan lansia berusia 60 tahun ke atas, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak memiliki suami. Langkah tersebut bahwa pelayanan dalam program BPNT telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang paling rentan, sehingga bantuan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan utama program yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Larangan. Integrasi, dalam prosedur dirasa sudah efektif. Bahwa pada pelaksanaan sosialisasi program BPNT di Desa Larangan terlihat dari adanya koordinasi yang solid antara pemerintah desa, kepala dusun, RW,RT dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Melalui pendekatan ini penyebaran informasi menjadi lebih rata hingga ke lapisan masyarakat terbawah, sehingga masyarakat dapat memahami dengan jelas syarat, mekanisme, dan tujuan program BPNT. Adaptasi, dalam pelaksanaan program BPNT di Desa Larangan telah berjalan cukup baik, meskipun masih menghadapi beberapa kendala administrasi. Masyarakat penerima manfaat menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sistem penyaluran bantuan, dari yang sebelumnya dilakukan secara manual di Balai Desa menjadi berbasis kartu ATM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan ini dengan baik. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, keluarga serta teman-teman yang telah memberikan dukungan doa dan bantuan dalam penulisan.

REFERENSI

- [1] Sofi Intan Febrianti and Isnaini Rodiyah, "Efektivitas Program Sembako Di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo," *J. Publicuho*, vol. 8, no. 2, pp. 763–778, 2025, doi: 10.35817/publicuho.v8i2.711.
- [2] I. G. Ayu And A. Hadi, "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Tindakan Tentang Administrasi Pemerintahan Oleh : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Pendahuluan Latar Belakang Menurut teori kenegaraan , terdapat dua tipe negara yakni negara penja," *Kertha Patrika*, vol. 39, no. 1, pp. 35–48, 2014.
- [3] H. P. Muslim, F. Eriyanti, and A. Mubarak, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Kuranji Kota Padang," *J. Manaj. dan Ilmu Adm. Publik*, vol. 2, no. 1, pp. 60–68, 2019, doi: 10.24036/jmiap.v1i2.19.
- [4] M. Ernawati, Sugianor, and Arpandi, "Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Program Sembako Di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Ambakiang Dan Desa Piyait)," *J. Pelayanan Publik*, vol. 1, no. 3, pp. 1001–1010, 2024.
- [5] D. Forensa, D. Alfatah, F. Faridah, and N. Rahayu, "Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui Metode E-Warung dalam Penanggulangan Kemiskinan," *J. STIA Bengkulu Committe to Adm. Educ. Qual.*, vol. 10, no. 2, pp. 197–206, 2024, doi: 10.56135/jsb.v10i2.179.
- [6] Nafilah Dzakiyah Al Azizah and Isna Fitria Agustina, "Implementasi Bantuan Sosial (Bansos) Dalam Upaya Pengurangan Kemiskinan Desa Banjardendo," *J. Publicuho*, vol. 8, no. 1, pp. 322–331, 2025, doi: 10.35817/publicuho.v8i1.670.
- [7] A. W. Sanjaya and M. H. Akhmadi, "Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan," *Transparansi J. Ilm. Ilmu Adm.*, vol. 5, no. 1, pp. 69–79, 2022, doi: 10.31334/transparansi.v5i1.1753.
- [8] I. Nurofik and L. M. Kolopaking, "Efektivitas Program Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT dan PKH) di Kota Mojokerto," *J. Manaj. AGRIBISNIS (Journal Agribus. Manag.)*, vol. 10, no. 1, p. 570, 2022, doi: 10.24843/jma.2022.v10.i01.p07.
- [9] R. Safrudin, Zulfamanna, M. Kustati, and N. Sepriyanti, "Penelitian Kualitatif," *J. Soc. Sci. Res.*, vol. 3, no. 2, pp. 1–15, 2023.
- [10] V. D. Windari and I. Rodiyah, "Mengubah Sistem Kesejahteraan Sosial: Wawasan dari Sistem Informasi Generasi Selanjutnya (SIKS-NG)," *J. Pemberdaya. Ekon. dan Masy.*, vol. 1, no. 1, p. 17, 2024, doi: 10.47134/jpem.v1i1.290.
- [11] C. Anwar, M. Mahmud, A. Maruwae, R. Hafi, and Sudirman, "Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Gorontalo," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 3, no. 3, pp. 2106–2118, 2023, [Online]. Available: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APengaruh>
- [12] K. Fadhli and L. R. Nazila, "Pengaruh Implementasi Bantuan Sosial Bpnt Dan Pkh Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan," *J. Educ. Dev.*, vol. 11, no. 2, pp. 196–202, 2023, doi: 10.37081/ed.v11i2.4654.
- [13] P. Rahayu and Hanik Fitriani, "Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam

- Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ponorogo,” *Niqosiya J. Econ. Bus. Res.*, vol. 3, no. 1, pp. 146–155, 2023, doi: 10.21154/niqosiya.v3i1.1758.
- [14] R. Nasution, “Analisis Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran,” *J. Ekon. Ekon. Syariah*, vol. 6, no. 1, pp. 810–823, 2023.
- [15] D. Kepada, F. Psikologi, U. Islam, and R. Untuk, “Dukungan Sosial Dengan Penyesuaian Diri Pada Mahasiswa Thailand,” 2020.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.